

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya, baik materiil maupun spiritual. Di samping tujuan tersebut, negara Indonesia juga menginginkan tercapainya keserasian hubungan antara kemerdekaan Indonesia dan kesejahteraan manusia sebagai individu dengan anggota masyarakat, dan bukan untuk mengedepankan atau mendahulukan kepentingan individu ataupun sekelompok orang saja.

Pelaksanaan untuk tujuan pembangunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup pesat, tetapi di sisi lain terdapat pula hal-hal yang menghambat perkembangan pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan tersebut dapat berasal dari anggota masyarakat, berupa tindak kejahatan atau tindak pelanggaran hukum. Hal tersebut adalah salah satu faktor penghambat pembangunan yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang berupa keresahan atau tipisnya sepermisi hukum, termasuk dalam hal ini adalah usaha dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fenomena kejahatan yang seringkali terjadi di Indonesia adalah adanya tindak kejahatan korupsi. Korupsi di negara Indonesia dianggap sudah membudaya dan sulit sekali untuk dihindarkan. Karena memang dalam

praktek pelaksanaan kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tidak akan lepas dari adanya praktek tindak kejahatan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat, karena korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan.¹

Pada intinya korupsi adalah perbuatan imoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Seperti bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, perbuatan korupsi termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya. Hal ini disebabkan karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan, bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi masyarakat dalam tugas pembangunan dan menurunnya kepercayaan rakyat pada jajaran aparat pemerintah.

Perbuatan korupsi terjadi dimana-mana, dan justru sering terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh belum mantapnya sistem administrasi keuangan dan pemerintahan, belum lengkapnya peraturan yang dimiliki, serta masih banyaknya ditemui celah-celah ketentuan yang merugikan masyarakat, lemah dan belum sempurnanya sistem pengawasan keuangan dan pembangunan, serta tingkat

¹ Kartini Kartono. 1988. *Patologi Sosial*. Jakarta. Bina Aksara. Hal. 3.

penggajian/pendapatan pegawai negeri yang rendah, di samping itu juga masih dijumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang menyebabkan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Faktor yang merupakan kendala dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, yang kita jumpai selama ini antara lain meliputi; belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukumnya. Kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui setelah memakan waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut, yang berakibat upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil, beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya.²

Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi dari segi hukum sehingga menghambat aparat penegak hukum terletak pada “masalah pembuktian”. Hal ini sebagai akibat dari cara berpikir hukum Barat diterima begitu saja tanpa mengolahnya kembali sesuai kebudayaan timur dan hukum.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat, karena korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan.

Indonesia memang tergolong rentan dengan persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan sebagai negara Otoriter Birokrasi (OB) Rente,

² *Ibid.* Hal. 13.

³ Juniadi Sowartojo. 1998. *Korupsi*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 102.

artinya negara via elit pejabat negara (pejabat) memungkinkan tumbuhnya kelompok berjuasi yang mendapatkan fasilitas proteksi, lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Atas fasilitas tersebut kaum berjuasi (pengusaha) memberikan imbalan kepada elit negara dengan perkataan lain di dalam sistem negara OB Rente ini memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan berbagai jenis kejahatan jabatan lainnya.⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode yang kedua saat ini, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap gencar dilakukan, terlebih apabila oknum penyelenggara negara ikut terlibat di dalamnya. Maka tak segan-segan beliau memberikan *green light* bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan upaya-upaya penindakannya. Dewasa ini pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan yang semakin sulit dan menuntut ketekunan serta keseriusan aparat karena modus operandi tindak pidana korupsi ini semakin rumit dan pelik.

Adanya *green light* dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi dukungan bagi aparat penegak hukum khususnya yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun sesuai dengan konsideran UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. KPK tidak saja sebagai penyidik tetapi juga sebagai penuntut terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan dibentuknya KPK telah banyak kasus korupsi yang berhasil digagalkan, sehingga dapat

⁴ Arief Budiman. 1991. *Negara dan Pembangunan*. Salatiga. Yayasan Padi dan Kapas. Hal. 31.

mengembalikan uang negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Penegak hukum yang kedua yang berkompeten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kepolisian. Polisi merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana korupsi, maka terhadap laporan adanya korupsi, polisi akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menangkap dan menyidik pelaku untuk kemudian diteruskan kepada Kejaksaan Negeri untuk kemudian dilakukan penuntutan. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Peranan dan strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memaksimalkan peran penegak hukum pemberantas korupsi. Di antara kebijakan-kebijakan pemerintah yang umum itu yakni pertama, *memilih pegawai*, lazimnya kita membayangkan tugas memilih pegawai sebagai menemukan orang-orang yang secara teknis paling mampu untuk pekerjaan yang dihadapi. Kedua, *mengubah imbalan dan hukuman*, alasannya membuat para pegawai lebih tertarik bertindak produktif untuk melawan korupsi dan kurang tertarik terlibat dalam perilaku yang tidak halal. Ketiga, *mengumpulkan informasi*, atasan mempunyai informasi tentang apa yang dilakukan pegawai dan klien, dia barangkali mampu mencegah korupsi dengan meningkatkan suasana bahwa korupsi akan dideteksi dan dihukum. Keempat, *mencoba untuk mengurangi peluang korupsi melalui perubahan*

organisasi, tujuannya adalah menghindari situasi dimana seorang pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit kemungkinan pertanggungjawaban. Kelima, mengubah sikap terhadap korupsi dengan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi sikap agar tidak berbuat korupsi.⁵

Didasari anggapan, bahwa tindak pidana korupsi adalah “*the most serious crime*”, maka pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai kekeliruan dalam menyusun UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga telah memberikan kewenangan kepada KPK dianggap telah merampas kewenangan yang ada pada Instansi Penegak Hukum lainnya, dalam hal ini kewenangan yang masih melekat pada Kepolisian Negara RI dan kewenangan yang masih melekat pada Kejaksaan Agung RI (yang juga diberikan oleh undang-undang dan hingga saat ini masih berlaku karena belum pernah dicabut). Bahkan berbagai kewenangan telah diberikan kepada KPK dengan melanggar dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip bahkan bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara wewenang Polri dan Kejaksaan selaku Penyidik dalam tindak pidana korupsi dengan wewenang KPK. Termasuk juga “pencaplokkan” terhadap wewenang Polri dan Kejaksaan oleh KPK yang diberikan oleh Undang-undang. Bahkan yang lebih parah lagi, KPK dapat menetapkan

⁵ Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta. Obor Indonesia. Hal. 98-119.

seorang sebagai tersangka berdasarkan informasi yang disampaikan melalui SMS dengan menggunakan kartu prabayar, yang menurut ketentuan Pasal 44 UU No.30 tahun 2002 (tentang KPK) dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum yang berkompeten dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seringkali dalam penanganan tindak pidana korupsi terjadi benturan di antara tiga lembaga penegak hukum ini, dimana semuanya merasa mempunyai kewenangan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi. Sebagai contoh ada seorang yang dicurigai melakukan korupsi, maka ketiga instansi ini berlomba untuk menangkap sang pelaku sehingga timbul pandangan bahwa ketiga lembaga penegak hukum ini mempunyai persaingan dalam menyelesaikan masalah korupsi.

Timbulnya persaingan dalam menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK tidak perlu terjadi apabila ketiga lembaga tersebut memahami kinerjanya masing-masing. Kerja sama yang erat sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga akan menjadi suatu langkah yang menakutkan bagi para koruptor. Sebaliknya perpecahan di antara ketiganya akan dapat menjadi titik lemah yang akan menjadikan para koruptor menang dan sulit tersentuh oleh hukum. Sebagai contoh adalah kasus *Build Out* Bank BI yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara KPK dan Kepolisian.

Kerjasama yang baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi antara KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak hanya di tingkat pusat saja, di daerah pun kerjasama dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan. Dalam menangani tindak pidana korupsi diharapkan melalui koordinasi antara lembaga-lembaga yang berkompeten untuk memberantas korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK dengan kewenangan masing-masing kepada pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat berlaku profesional demi terlaksananya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut maka judul penulisan dalam penelitian ini adalah: “STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan normatif Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi?

2. Apakah ada karakteristik tertentu tentang Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan di Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mendeskripsikan peranan normatif Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Mendeskripsikan dan menjelaskan adanya karakteristik tertentu tentang Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Tujuan Subyektif.
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum.
 - c. Membandingkan materi hukum yang diterima di perkuliahan dengan kenyataan sehari-hari di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya penanganan terhadap tindak pidana korupsi dan karakteristik tertentu tentang tindak pidana korupsi yang harus diselesaikan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan anti korupsi dan perundangan lainnya yang relevan.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah suatu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.⁶

Metode penelitian adalah bagian dari metodologi penelitian. Langkah-langkah ilmiah menurut metodologi adalah ada masalah, tujuan, tinjauan

⁶ Koentjoroningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia. Hal. 22.

pustaka, kerangka teori, hipotesis (jika ada) dan cara penelitian. Cara penelitian itulah yang dimaksud dengan metode.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti ilmu tentang metode. Metode dalam arti yang umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.⁸

Metode merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Tanpa suatu metode, maka seorang peneliti akan sulit menentukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam mengungkapkan kebenaran.

Sedangkan menurut Winarno Surachman, metode penelitian adalah: “Suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.⁹

Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.

⁷ Setiono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta. UNS Press. Hal. 4.

⁸ WJS. Poerwodarminto. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 653.

⁹ Winarno Surachman. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta. UI Press. Hal. 26.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Komparatif. Yuridis adalah hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Sedangkan komparatif adalah berdasarkan perbandingan. Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini bersifat membandingkan pandangan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan perbandingan-perbandingan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini akan diteliti Peranan normatif Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu kaidah dasar, peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 2) UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
- 5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- 6) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui buku-buku hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel koran serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan data yang bersifat primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berkas penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan melalui studi kepustakaan atau *library research* guna memperoleh landasan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai kajian teori. Data diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhadapan dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian.

b. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi langsung ke lapangan, dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Surakarta. Adapun data yang diperoleh melalui Wawancara (*Interview*). Wawancara digunakan sebagai pelengkap dari data yang sudah diperoleh. Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung dua orang atau lebih berhadapan secara langsung atau tidak (melalui media komunikasi). Data dari interview diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan pada kasus korupsi yaitu dengan Jaksa Sigit Purnomo, SH. Adapun materi yang menjadi bahan wawancara adalah:

- 1) Peranan normatif kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi
- 2) Hubungan kejaksaan dengan kepolisian dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Karakteristik korupsi
- 4) Hambatan-hambatan dalam melakukan penuntutan

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan konsep normatif, dimana hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.¹⁰

¹⁰ Setiono. *Opcit.* Hal. 22.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian; dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang: Pengertian Tindak Pidana Dan Syarat Pidana, Pengertian Dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Perbandingan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang: Peranan normatif Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan karakteristik Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN